

BAB IV

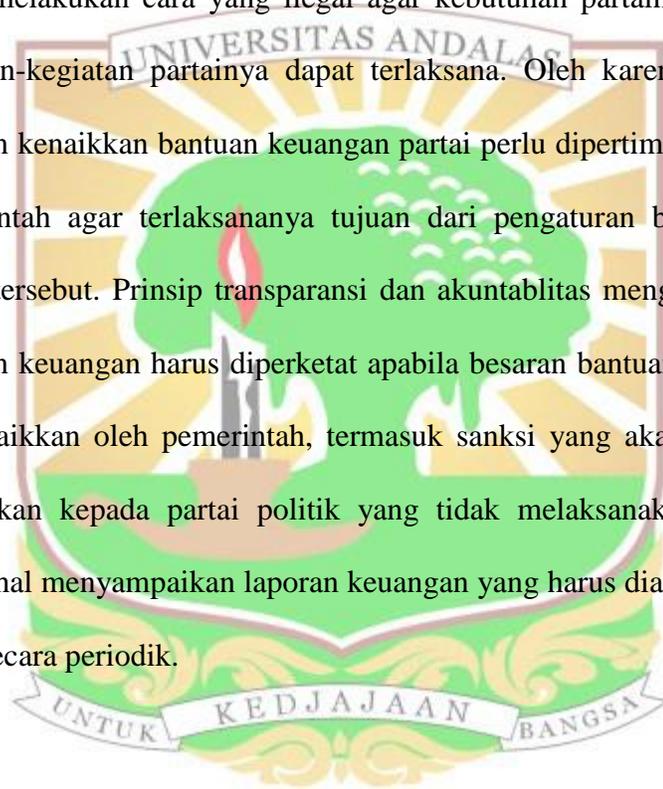
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bantuan keuangan (*public funding*) partai politik memiliki implikasi positif dan negatif terhadap partai politik itu sendiri. Implikasi positif bantuan keuangan negara untuk partai diantaranya yaitu mencegah pihak swasta khususnya para penyumbang menguasai partai politik yang ingin memanfaatkan para kader partai yang duduk di lembaga legislatif membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya secara pribadi, dan dana publik ini dapat menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan dan pengeluaran karena dana tersebut berasal dari negara yang wajib diaudit dan dipertanggungjawabkan, sehingga tujuan pengaturan keuangan partai politik dapat terlaksana yaitu untuk menjaga kemandirian partai politik dari pihak luar (swasta). Dalam hal kampanye, dana publik ini dapat menjamin persaingan yang sehat antar partai karena memiliki sarana yang relatif setara dalam melaksanakan kampanye.
2. Beberapa instrumen/komponen di dalam peraturan perundang-undangan mengenai partai politik dan bantuan keuangan partai politik harus di perbaiki dan diperjelas baik itu pengaturan besaran bantuannya, pengaturan

pengelolaan bantuan keuangan dan sanksi yang akan diterapkan nantinya. Karena mengingat bahwa bantuan keuangan partai politik yang berasal dari negara sangat kecil yaitu hanya 0,0007% dari total pendapatan negara, dan 2% dari total kebutuhan partai, yang itu artinya partai harus mencari 98% lagi untuk memenuhi kebutuhan partainya, sehingga mau tidak mau partai harus melakukan cara yang ilegal agar kebutuhan partainya tercukupi dan kegiatan-kegiatan partainya dapat terlaksana. Oleh karena itu, menaikkan bantuan kenaikan bantuan keuangan partai perlu dipertimbangkan lagi oleh pemerintah agar terlaksananya tujuan dari pengaturan bantuan keuangan partai tersebut. Prinsip transparansi dan akuntabilitas mengenai pengelolaan bantuan keuangan harus diperketat apabila besaran bantuan keuangan partai ini dinaikkan oleh pemerintah, termasuk sanksi yang akan diterapkan dan dijatuhkan kepada partai politik yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal menyampaikan laporan keuangan yang harus diaudit dan diperiksa BPK secara periodik.



B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis berikan dalam permasalahan ini adalah:

1. Peningkatan mengenai besaran bantuan keuangan partai politik perlu dilakukan karena bantuan keuangan dari negara sangat kecil untuk bisa memenuhi kebutuhan partai. Akan tetapi, menaikkan jumlah besaran ini harus secara bertahap sampai partai politik benar-benar bisa mengelola

keuangannya dengan baik. Karena selama ini partai politik di Indonesia tergolong sangat buruk dalam mengelola bantuan keuangan partainya. Peningkatan bantuan keuangan partai politik ini cukup diatur didalam peraturan pemerintah saja, karena peraturan pemerintah ini bisa ditinjau setiap tahun dan dilakukan perubahan bila diperlukan, dan di dalam peraturan pemerintah tersebut harus memuat ketentuan bahwa 65%-75% bantuan keuangan dipergunakan untuk membiayai pendidikan politik dan kaderisasi politik seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2011, sedangkan sisanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekretariat.

2. Pemerintah harus merevisi peraturan perundang-undangan tentang partai politik khususnya mengenai bantuan keuangan partai politik yang masih terdapat beberapa kelemahan. Seperti penjatuhan sanksi yang ringan sehingga partai tidak mempan dan takut terhadap sanksi yang diberikan oleh pemerintah, dan mengenai laporan tahunan keuangan partai politik, harus jelas kepada siapa diberikan, bagaimana mekanismenya dan sanksi yang akan diberikan apabila partai politik tidak membuat laporan tahunan keuangan partainya. Sehingga prinsip utama dari pengaturan bantuan keuangan partai politik yaitu transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik.

